



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2696/SEK/HM.02.3/11/2022

25 November 2022

Lampiran : Satu Lampiran

Hal : Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi  
e-BERPADU Versi 2.0.0

Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial nomor: 42/WKMA.NY/SB/11/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penugasan Perbaikan aplikasi SIPP versi 5.0.0 dan aplikasi e-BERPADU versi 2.0.0, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembaruan Aplikasi e-BERPADU versi 1.0.0 menjadi versi 2.0.0 pada tanggal 22 Nopember 2022.
2. Masing-masing Badan Peradilan agar menginformasikan ke Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait rilis aplikasi e-BERPADU versi 2.0.0 yang digunakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan APH terkait
3. Seluruh Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan agar mendukung dan turut memantau pelaksanaan Perubahan Aplikasi pemutakhiran e-BERPADU versi 2.0.0 dan melakukan evaluasi terhadap hal-hal tersebut.

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Lampiran I  
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Nomor : 2696/SEK/HM.02.3/11/2022  
Tanggal : 25 November 2022

Berikut ini perbaikan, penambahan dan optimalisasi pada fitur maupun fungsi yang telah diterapkan pada Aplikasi e-BERPADU versi 2.0.0 antara lain:

- Monitoring Pimpinan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding
- Perpanjangan Penahanan Tingkat Banding
- Perpanjangan Penahanan Tingkat Kasasi
- Penambahan Fitur untuk Peradilan Militer
- Penambahan Fitur untuk KPK, BNN, PPNS
- Penambahan Fitur untuk Jenis Perkara Pidana Khusus (Tipikor, Perikanan)
- Penambahan Fitur untuk Tanda Tangan Elektronik pada Penetapan.
- Penambahan Fitur Menu Ketua Pengadilan untuk Tanda Tangan Elektronik.
- Integrasi dengan SIPP.
- Dan optimalisasi fitur-fitur lainnya.